

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN DISKRESI
MENTERI DALAM NEGERI DALAM MENGANGKAT
ANGGOTA POLRI AKTIF SEBAGAI PELAKSANA TUGAS
GUBERNUR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



**WIKA WIDIANTARI
1711150063**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN DISKRESI
MENTERI DALAM NEGERI DALAM MENGGANGKAT
ANGGOTA POLRI AKTIF SEBAGAI PELAKSANA TUGAS
GUBERNUR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
KOTA BENGKULU
2024 M/1446 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI

SUKARNO BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon: (0736) 51276-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wika Widiantari, NIM: 1711150063 dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Diskresi Menteri Dalam Negeri Dalam Mengangkat Anggota POLRI Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Siyasah Dusturiyah". Program Studi Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqosyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu.



Bengkulu 13 Juni 2024 M

6 Zulhijjah 1445 H

BENGKULU

Pembimbing I

Pembimbing II

Fauzan, S.Ag., MH

A. Majid Ali, S.Sos., M.Si

NIP. 197707252002121003

NIP. 196504011986021007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI

SUKARNO BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skrripsi oleh: **Wilka Widiantari**, NIM: **1711150063** yang berjudul
"Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Diskresi Menteri Dalam Negeri
Dalam Mengangkat Anggota POLRI Aktif Sebagai Pelaksana Tugas
Gubernur Perspektif Syasah Dusturiyah", Program Studi Hukum Tata Negara
telah diuji dan dipertahankan didepan ian sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari: **Senin**

Tanggal: **24 Juni 2024**

Dan layak dinyatakan **LULUS**, dapat dit **lan** disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, **Fatmawati, 2024 M**

1445 H

Dekan

Prof. Dr. Suwarijū, S.Ag., M.A.

196904021999031004

Tim Sidang Munaqosyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Rohmadi, S.Ag.MA

A. Majid Ali S.Sos., M.Si

NIP. 197103201996031001

NIP. 196504011986021007

Penguji I

Penguji II

Dr. Rohmadi, S.Ag.MA

Ifansyah Putra, M.Sos

NIP. 197103201996031001

NIP. 199303312019031005

MOTTO

“Dua Musuh Terbesar Kesuksesan Adalah Penundaan dan Alasan”

“Jangan Tunggu Sempurna, Karena Tindakan adalah Kunci Dari
Kemajuan”

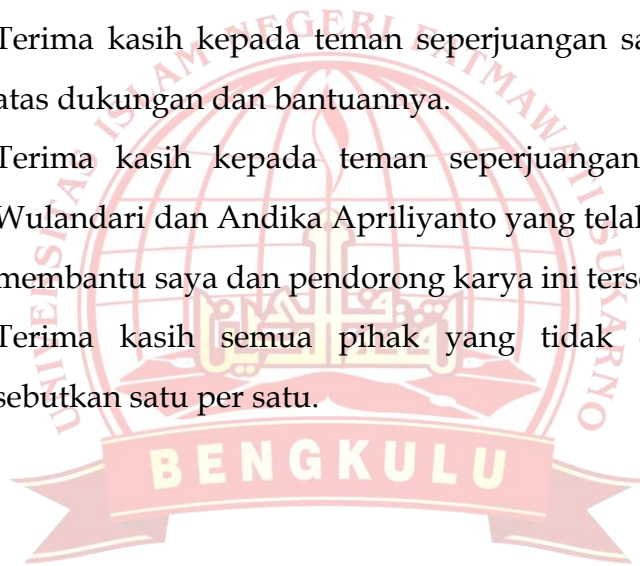


PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Terima kasih Ayahanda (Edi Sucipto) dan Ibunda (Cut Yesri Safika) tersayang yang tak pernah lelah berjuang memberikan segala usahanya, terima kasih telah membesarkan, mendidik serta mendo'akan ananda. Mohon maaf jika selama ini telah menyusahkan dan membuat kecewa. Inshaallah ananda bisa membahagiakan dan membalas jasa kalian. Semoga Rahmat Allah SWT senantiasa tercurahkan kepada Ayah dan Ibu.
2. Terimas kasih Adik ku (Melva Maulidia) atas perhatian dan kasih sayangnya.
3. Terima Kasih tak henti-hentinya saya ucapkan kepada Dosen Pembimbing I Bapak Fauzan, S.Ag.,MH dan Dosen Pembimbing II Bapak A. Majid Ali, S.Sos.,M.Si yang telah membimbing saya dengan sabar, mengarahkan dan memberikan pengetahuannya hingga saya bisa sampai berada ditahap seperti sekarang ini.

4. Terima kasih untuk semua Dosen pengajar selama saya berada di UINFAS atas ilmu pengetahuan, pengarahannya. Dan terima kasih untuk UINFAS Bengkulu yang telah menerima saya sehingga saya bisa menuntut ilmu dengan baik.
5. Terima kasih kepada sahabatku Indri Annisa, Sulitiyani Rahma, Roswida Sri dan Salmah Lubis yang selalu menyemangati saya dan mengingatkan saya.
6. Terima kasih kepada teman seperjuangan saya HTN A atas dukungan dan bantuannya.
7. Terima kasih kepada teman seperjuangan saya Ayu Wulandari dan Andika Apriliyanto yang telah senantiasa membantu saya dan pendorong karya ini terselesaikan.
8. Terima kasih semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Diskresi Menteri Dalam Negeri Dalam Mengangkat Anggota POLRI Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Siyash Dusturiyah” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di UIN FAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 6 Zulkhijjah 1445 H
13 Juni 2024 M

Mahasiswa yang menyatakan



Wika Widiyanti
NIM. 1711150063

ABSTRAK

Wika Widianteri, NIM. 1711150063. Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Diskresi Menteri Dalam Negeri Dalam Mengangkat Anggota POLRI Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Siyasah Dusturiyah. Pendekatan siyasah dusturiyah digunakan untuk menganalisis konteks hukum dan kebijakan yang mengatur hal tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini mendapati dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Diskresi Menteri Dalam Negeri Dalam Mengangkat Anggota POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur? Kedua, bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Diskresi Menteri Dalam Negeri Dalam Mengangkat Anggota POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Siyasah Dusturiyah? Adapun tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Diskresi Menteri Dalam Negeri Dalam Mengangkat Anggota POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur. Kedua, bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Diskresi Menteri Dalam Negeri Dalam Mengangkat Anggota POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Siyasah Dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data-data yang dikumpulkan berupa buku, kitab perundang-undangan, surat kabar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan diskresi tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan implikasi dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan diskresi dalam konteks penunjukan anggota POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) sebagai pelaksana tugas Gubernur.

Kata Kunci: Diskresi Menteri Dalam Negeri, Tinjauan Yuridis, Siyasah Dusturiyah

ABSTRACT

Wika Widianteri, NIM. 1711150063. Legal Review of the Use of Discretion of the Minister of Home Affairs in Appointing Active POLRI Members as Acting Governors from a Siyasah Dusturiyah Perspective. The siyasah dusturiyah approach is used to analyze the legal context and policies that regulate this matter. Therefore, this study found two problem formulations. First, how is the Legal Review of the Use of Discretion of the Minister of Home Affairs in Appointing Active POLRI (Indonesian National Police) Members as Acting Governors? Second, how is the Legal Review of the Use of Discretion of the Minister of Home Affairs in Appointing Active POLRI (Indonesian National Police) Members as Acting Governors from a Siyasah Dusturiyah Perspective? The purpose of this study is first, to find out how is the Legal Review of the Use of Discretion of the Minister of Home Affairs in Appointing Active POLRI (Indonesian National Police) Members as Acting Governors. Second, how is the Legal Review of the Use of Discretion of the Minister of Home Affairs in Appointing Active POLRI (Indonesian National Police) Members as Acting Governors from the Perspective of Siyasah Dusturiyah. The research method used is normative legal by using data collected in the form of books, statute books, newspapers. The results of this study indicate that the use of discretion must pay attention to the principles of law and justice, and minimize the potential for abuse of power. The implications of this study can contribute to strengthening the oversight mechanism for the use of discretion in the context of appointing POLRI (Indonesian National Police) members as acting Governors.

Keywords: Discretion of the Minister of Home Affairs, Legal Review, Siyasah Dusturiyah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirahim.

Alhamdulillah kalimat mulia yang selalu kita lafadzkan sebagai bentuk puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT zat yang maha mulia, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini yang tuntas. Dalam skripsi ini, penulis meneliti perihal yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Diskresi Menteri Dalam Negeri Dalam Mengangkat Anggota POLRI Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Siyasah Dusturiyah”**

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk membawa risalah serta misi kemanusiaan sehingga manusia mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

2. Dr. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah Putra, M. Sos selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Fauzan, S.Ag.,MH selaku Pembimbing I dan A. Majid Ali, S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing II
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Pejabat dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tidak luput dari khilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik untuk Skripsi ini kedepannya.

Bengkulu,
Penulis

2024

Wika Widiantari
NIM. 1711150063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Bahan Hukum	12
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Teknik Analisis Data	13
5. Teknik Penulisan	14

G. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN TEORI.....	17
A. Teori Negara Hukum.....	17
B. Teori Perundang-Undangan	21
C. Konsepsi Diskresi	27
D. Kepolisian	41
1. Pengertian Kepolisian.....	41
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	43
3. Diskresi Kepolisian.....	50
E. Kementerian Dalam Negeri	51
F. Gubernur.....	54
G. Teori Kewenangan Pemerintah.....	58
H. Konflik Kepentingan.....	61
I. Teori Siyash Dusturiyah.....	62
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	71
A. Tinjauan Turidis Terhadap Penggunaan Diskresi Menteri Dalam Negeri Dalam Mengangkat Anggpta POLRI Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur.....	71
B. Tinjauan Turidis Terhadap Penggunaan Diskresi Menteri Dalam Negeri Dalam Mengangkat Anggpta POLRI Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Siyash Dusturiyah.....	77

BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

